

SKRIPSI

ANALISIS KESEJAHTERAAN NELAYAN DI INDONESIA

MUHAMMAD ALWI

A011171337



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

ANALISIS KESEJAHTERAAN NELAYAN DI INDONESIA

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ALWI
A011171337



kepada

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

SKRIPSI

ANALISIS KESEJAHTERAAN NELAYAN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD ALWI

A011171337

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 02 April 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Rahmatia, S.E., M.A.
NIP. 19630625 198703 2 001

Pembimbing II



Di ACC untuk diujikan
02/04/2022

Dr. Munawwarah S. Mubarak, S.E., M.Si.
NIP. 19871109 201404 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Samud Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM®
NIP. 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS KESEJAHTERAAN NELAYAN DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ALWI
A011171337

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 20 Mei 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
1.	Prof. Rahmatia, SE., M.A.	Ketua	1. 
2.	Dr. Munawwarah S. Mubarak, SE., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Indraswati T.A Reviane, SE., M.A., CWM®	Anggota	3. 
4.	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM®	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Muhammad Alwi**
Nomor Pokok : A011171337
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Kesejahteraan Nelayan di Indonesia*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Mei 2022

Yang Menyatakan



(Muhammad Alwi)

Nim: A011171337

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur Penulis hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekaligus menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa menjadi suri tauladan terbaik bagi ummatnya menuju jalan yang lurus hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul "**ANALISIS KESEJAHTERAAN NELAYAN DI INDONESIA**" disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan serta masukan dan saran dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis sadari Skripsi ini masih belum sempurna dan tak luput dari kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan dari peneliti. Akan tetapi penulis memiliki harapan besar semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan menjadi pelajaran bagi penulis pribadi maupun yang membacanya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah Mursalim dan ibu Hatija yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga. Kepada kakak-kakak penulis Nur Amina dan Muhammad Anwar yang telah memberikan motivasi dan menjadi sosok panutan yang baik sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini dan tahap

selanjutnya. Kepada seluruh keluarga besar yang tak sempat peneliti sebutkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan motivasi kepada peneliti.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas seluruh bantuannya, yakni kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM® dan Sekretaris Dapartemen Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E, M.Si., CWM® Terima Kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Prof. H. Marsuki, S.E., DEA., Ph.D selaku penasehat akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Rahmatia, S.E., M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Munawwarah S. Mubarak, S.E., M.Si selaku pembimbing II penulis. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bimbingan dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, S.E., MA., CWM® dan ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E, M.Si., CWM®. selaku dosen penguji, terima kasih atas waktu dan motivasi yang telah diberikan serta kritik dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan dan nasihat kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman “ERUDITE” Ilmu ekonomi 2017, terimakasih kebersamaannya mulai dari Maba hingga wisuda insyaallah silaturahmi tetap jalan dan sukses terus kedepannya. Terkhusus “Anak Rekt0r” terimakasih persaudaraannya dan bantuan materi serta non materi yang diberikan kepada penulis sehingga bisa melalui proses perkuliahan dengan mudah serta teman seperjuangan perskripsian M. Fakhruddin Ridwan, M ichsan Wahyudi dan Muh Ferdi perjuangan lebih besar di depan mata (dunia kerja).
9. Keluarga besar KSEI FoSEI Unhas yang telah memberikan rasa ukhuwah, semangat dakwah dan pengetahuan ilmiah dalam membumikan Ekonomi Islam. Terkhusus Badan Pengurus Harian KSEI FoSEI Unhas Periode 2018/2019 terimakasih satu periode berharga dengan Ukhuwah saling membebani dalam “saling tolong menolong” dan saling mendahului “dalam mengejar kebaikan”.
10. Keluarga besar HIMAJIE terimakasih telah mengajarkan apa itu keluarga yang sesungguhnya. Terkhusus teman-teman kepengurusan “Kabinet Merapi” HIMAJIE FEB-UH Periode 2021 terimakasih waktu yang singkat namun berkesan dalam menambah pengalaman penulis.
11. Keluarga besar HPPMI Maros Komisariat Unhas-PNUP yang telah memberikan kekeluargaan dengan semangat “butta salewangan”. Terkhusus pengurus HPPMI Maros Kom. Unhas PNUP Periode 2019/2020 terimakasih telah tetap menampung walaupun penulis sering menghilang.
12. Keluarga besar FoSSEI Regional Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara dan Maluku, merupakan rumah disetiap persinggahan. Terimakasih BPH “Solid”

FoSSEI Sulselbar & Papua Periode 2019/2020 dan Terimakasih BPH “Sinergi Berkarya” FoSSEI Sulselbar & Maluku Periode 2020/2021, terimakasih ukhuwahnya dalam mensyiarkan ekonomi islam dengan semangat Ekonom Rabbani.

13. Pengurus “Kabinet Inklusi” Senat Mahasiswa FEB-UH Periode 2019/2020, terimakasih kebersamaannya dalam mengenal 3 warna (merah, biru, dan ungu) dalam balutan hitam putih.
14. Teman-teman seperjuangan masa SMA “IIS 2 SMAGA”, terimakasih masih tetap terjaga komunikasi dan silaturahmi hingga sekarang.
15. Terimakasih kepada Prasetyo Lupojo, Muh. Taufik, Sul Iman Syahrul, Deswandi Harten, dan Nurainun yang Paling berjasa memberikan motivasi, ilmu, dan bantuan kepada penulis dan Nur Eka Fitriani Said dan Dinda Averina Dwiyantri yang selalu mendesak penulis cepat lulus.
16. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 20 Mei 2022

Muhammad Alwi

ABSTRAK

ANALISIS KESEJAHTERAAN NELAYAN DI INDONESIA

Muhammad Alwi

Rahmatia

Munawwarah S. Mubarak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ekspor, kebijakan subsidi, investasi dan harga BBM terhadap kesejahteraan nelayan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun data yang digunakan yaitu data *time series* tahun 2005-2020 di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kebijakan subsidi dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan nelayan di Indonesia. Sedangkan variabel ekspor dan harga BBM tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan nelayan di Indonesia.

Kata kunci: Kesejahteraan nelayan, Nilai tukar nelayan, Ekspor, Kebijakan Subsidi, Investasi, Harga BBM.

ABSTRACT

ANALYSIS OF FISHERMEN'S WELFARE IN INDONESIA

Muhammad Alwi

Rahmatia

Munawwarah S. Mubarak

This study aims to analyze the influence of exports, subsidy policies, investment and fuel prices on the welfare of fishermen in Indonesia. This study used secondary data obtained from the Central Statistics Agency, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the Ministry of Finance, the Investment Coordinating Board and the Ministry of Energy and Mineral Resources. The data used is time series data for 2005-2020 in Indonesia. The analysis method used is the multiple linear regression method. The results of this study show that subsidy and investment policy variables have a positive and significant effect on the welfare of fishermen in Indonesia. Meanwhile, export variables and fuel prices do not have a significant effect on the welfare of fishermen in Indonesia.

Keywords: Fishermen's welfare, Fishermen's exchange rate, Export, Subsidy Policy, Investment, Fuel Price.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Kesejahteraan	9
2.1.2 Ekspor	12
2.1.3 Kebijakan Subsidi	13
2.1.4 Investasi	15
2.1.5 Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)	17
2.2 Tinjauan Teoritis	18
2.2.1 Hubungan ekspor dengan kesejahteraan nelayan	18
2.2.2 Hubungan Kebijakan subsidi dengan kesejahteraan nelayan	19
2.2.3 Hubungan investasi dengan kesejahteraan nelayan	20
2.2.4 Hubungan Harga BBM terhadap kesejahteraan nelayan	21
2.3 Tinjauan Empiris	22
2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian	25

2.5	Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	27
3.2	Jenis dan Sumber Data	27
3.3	Metode Analisis Data	28
3.4	Definisi Operasional	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		31
4.1	Perkembangan Variabel Penelitian	31
4.1.1	Perkembangan Kesejahteraan nelayan.....	31
4.1.2	Perkembangan Ekspor Perikanan.....	33
4.1.3	Perkembangan Kebijakan Subsidi.....	35
4.1.4	Perkembangan Investasi perikanan	37
4.1.5	Perkembangan Harga BBM.....	39
4.2	Analisis Data	40
4.2.1	Uji Asumsi Klasik.....	43
4.2.2	Hasil Estimasi Penelitian.....	47
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	49
4.3.1	Pengaruh Ekspor Perikanan terhadap kesejahteraan nelayan.....	49
4.3.2	Pengaruh kebijakan subsidi terhadap kesejahteraan nelayan.....	52
4.3.3	Pengaruh investasi perikanan terhadap kesejahteraan nelayan....	55
4.3.4	Pengaruh harga BBM terhadap kesejahteraan nelayan	56
BAB V PENUTUP		60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		63
LAMPIRAN		72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Nilai Tukar Nelayan Indonesia Tahun 2011-2020.....	3
Gambar 1.2 Investasi, Subsidi, Harga BBM dan Ekspor Perikanan Indonesia Tahun 2011-2020.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	25
Gambar 4.1 Nilai Tukar Nelayan Indonesia tahun 2005-2020.....	32
Gambar 4.2 Ekspor Perikanan Indonesia tahun 2005-2020.....	34
Gambar 4.3 Subsidi Non Energi Indonesia tahun 2005-2020	36
Gambar 4.4 Investasi Perikanan Indonesia tahun 2005-2020.....	37
Gambar 4.5 Harga BBM Indonesia tahun 2005-2020	39
Gambar 4.6 Bagan Hasil Penelitian	43

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: sumber data variabel penelitian.....	27
Tabel 4.1: Hasil estimasi regresi Ekspor perikanan, Kebijakan Subsidi, Investasi, Harga BBM terhadap Kesejahteraan Nelayan	41
Tabel 4.2: Hasil Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4.3: Hasil Uji Heteroskedistisitas	44
Tabel 4.4: Hasil Uji Autokorelasi	45
Tabel 4.5: Hasil Uji Normalitas.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

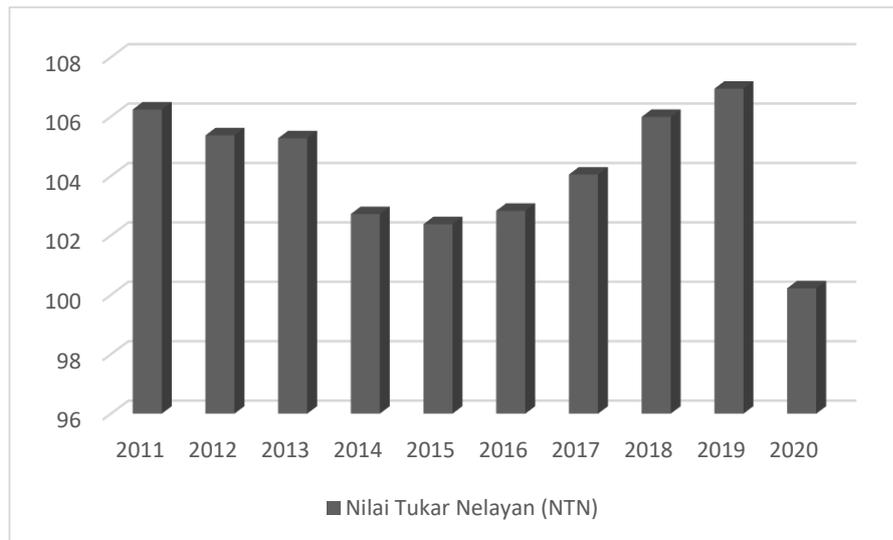
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kawasan perairan sangat luas dengan potensi sumber daya yang besar dalam pemanfaatan pembangunan nasional. Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan lebih banyak pilihan bagi anggota masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Peranan sektor pertanian/perikanan dalam pembangunan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Pembangunan sektor pertanian/perikanan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja serta mendorong kesempatan berusaha (Soekartawi, 2002).

Dalam mencermati pembangunan Indonesia selama ini, secara empiris pembangunan kelautan dan perikanan kurang mendapat perhatian dan selalu diposisikan sebagai pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini sangat ironis, mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, sehingga negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sekitar 16,42 juta jiwa penduduk Indonesia hidup di kawasan Pesisir. Mereka bertempat tinggal di daratan 8.090 desa Pantai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pilihan untuk hidup di kawasan Pesisir tentu sangat relevan mengingat Seluruh wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati, sumber daya

buatan serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi penghidupan masyarakat, dan kondisi geografis yang memiliki garis pantai yang lebih panjang ditambah potensi perikanan yang ada.

Sektor perikanan memiliki potensi penggerak perekonomian baik secara makro maupun mikro. Secara makro sektor perikanan menjadi penyumbang devisa dengan kegiatan ekspor. Secara mikro sektor perikanan memberi dampak penyediaan tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat seiring dengan peningkatan pendapatan para pelaku usaha di bidang perikanan (Nugroho, 2013). Dengan wilayah yang sebagian besar terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan yang cukup besar Negara Indonesia seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan tersebut. Untuk mendapatkan gambaran perubahan kesejahteraan nelayan dibutuhkan sebuah indikator yang mudah digunakan. Salah satu instrumen untuk mengukur kesejahteraan nelayan adalah dengan menggunakan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 2021

Gambar 1.1 Nilai Tukar Nelayan Indonesia Tahun 2011-2020

Dari gambar 1.2 Nilai tukar nelayan (NTN) mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Pada tahun 2014, NTN mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015 di angka 102,38. Penurunan ini disebabkan oleh penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia atau *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU-Fishing)*. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2014 mencatat kerugian negara akibat *illegal fishing* diperkirakan 101 triliun rupiah per tahunnya. Pada tahun 2016 NTN berangsur-asur naik sampai ke tahun 2019 di angka 106,94 karena penanganan masalah perikanan dilaksanakan secara tegas mulai tahun 2014. Menurut kementerian kelautan dan perikanan (2017), melalui Peraturan Presiden (Perpres No. 115 Tahun 2015) Hal ini penting agar sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan Indonesia mampu mewujudkan capaian kedaulatan pangan.

Capaian NTN Indonesia masih mendekati angka 100 hal ini menandakan kesejahteraan nelayan masih rentan. Secara teori ketika NTN bernilai < dari 100 maka nelayan berada dalam kondisi kritis, hal ini disebabkan pendapatan mereka jauh lebih kecil dibanding dengan pengeluarannya, baik untuk kebutuhan rumah

tangga atau ongkos produksi. Atau dengan kata lain nelayan mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibanding dengan kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya.

Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya. Banyaknya tangkapan secara langsung juga berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima hingga nelayan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersedia dan mudah dijangkau setiap penduduk sehingga pada gilirannya penduduk yang miskin semakin sedikit jumlahnya (Nasution, 2016). Menurut Todaro (2004) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya-miskin, serta pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional.

Faktor-faktor dalam peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan perikanan di Indonesia menurut Mulyadi (2007) yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan seperti: Pertama, kemampuan dalam memproduksi komoditas perikanan yang berdaya saing tinggi (berkesinambungan), baik melalui usaha penangkapan maupun usaha budi daya masih rendah. Hasil tangkapan ikan per satuan upaya (per perahu atau per nelayan) di laut masih relatif, bersifat fluktuatif atau tak menentu. Kedua, kemampuan dalam memasarkan komoditas perikanan dengan harga yang menguntungkan baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor masih juga lemah. Harga jual produk perikanan sangat cepat berubah, dan sering mengalami market glut, yakni suatu

kondisi pasar yang harga jual suatu komoditasnya menurun dratis ketika pasokan komoditas tersebut melimpah dan harga jual membaik manakala pasokannya kecil (sedang paceklik). Ketiga, harga faktor-faktor produksi seperti bahan bakar, alat tangkap, mesin kapal, dan lainnya relatif mahal dan bersifat fluktuatif.



Sumber: BPS, KKP, KESDM, Kemenkeu, diolah 2022.

Gambar 1.2 Investasi, Subsidi, Harga BBM dan Ekspor Perikanan Indonesia Tahun 2011-2020

Upaya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dilihat dari beberapa faktor seperti pengaruh ekspor, subsidi, investasi dan bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan perubahan investasi, subsidi, bahan bakar dan ekspor perikanan Indonesia dari tahun ke tahun yang berfluktuasi. Tingkat ekspor perikanan Indonesia berfluktuasi cenderung meningkat dari tahun 2011-2020. Hal ini disebabkan oleh kebijakan perikanan larangan bongkar muat hasil perikanan di tengah laut (*transshipment*) pada tahun 2015 menjadi faktor penyebab turunnya ekspor perikanan Indonesia serta IUU-Fishing. Dalam membantu mendorong produksi produsen atau konsumsi

konsumen nelayan, kebijakan subsidi yang dikeluarkan pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (2011-2020) hal ini peran pemerintah dalam pembangunan perikanan bertujuan untuk menyokong peningkatan kualitas ekonomi, membantu golongan yang berpendapatan rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi nelayan. Perkembangan investasi perikanan berfluktuasi cenderung meningkat pada tahun 2011-2020, menurut kementerian kelautan dan perikanan ketegasan dalam penanggulangan masalah IUU-Fishing meningkatkan kepercayaan investor kepada perikanan Indonesia.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan input produksi vital bagi kegiatan usaha produksi ikan di sektor kelautan dan perikanan, baik pada usaha-usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan. Pada usaha perikanan tangkap, pengeluaran untuk pembelian BBM mencapai 50 - 70% dari total biaya operasional melaut. Beberapa hal yang mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran BBM diantaranya adalah besaran ukuran kapal, jenis peralatan tangkap yang digunakan, jangka waktu melaut, banyaknya trip penangkapan dalam suatu periode, jarak ke lokasi tangkapan, dan lain sebagainya. Kondisi saat ini, usaha nelayan untuk melakukan penangkapan ikan semakin bertambah besar karena sumberdaya perikanan semakin sulit ditemukan. Nelayan harus menambah hari dan jarak melaut untuk menangkap ikan yang ketersediaannya semakin langka dan berkurang (Kinseng, 2007).

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan dalam melihat fenomena nelayan Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kesejahteraan Nelayan di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Ekspor Perikanan berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan nelayan di Indonesia.
2. Apakah Kebijakan Subsidi berpengaruh signifikan Kesejahteraan nelayan di Indonesia.
3. Apakah Investasi berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan nelayan di Indonesia.
4. Apakah Harga BBM berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan nelayan di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Ekspor Perikanan terhadap Kesejahteraan Nelayan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Subsidi terhadap Kesejahteraan Nelayan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Kesejahteraan Nelayan di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Harga BBM terhadap Kesejahteraan Nelayan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ragam penelitian tentang analisis pengaruh Ekspor perikanan, Kebijakan Subsidi, Investasi, dan Harga

BBM terhadap Kesejahteraan nelayan di Indonesia dan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Analisis Kesejahteraan Nelayan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dengan mengetahui adanya Analisis Kesejahteraan Nelayan di Indonesia, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dalam membuat dan menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengaruh Kesejahteraan Nelayan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kesejahteraan

Dalam memahami konsep Kesejahteraan, Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefenisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi pokok yang harus diperhitungkan adalah (1) standar hidup materiil (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan; (2) kesehatan; (3) pendidikan; (4) aktivitas individu, termasuk bekerja; (5) suara politik dan tata pemerintahan; (6) hubungan dan kekerabatan sosial; (7) lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan); dan (8) ketidaknyamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua dimensi tersebut menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif.

Menurut Sukirno (2011) untuk mengetahui gambaran perkembangan kesejahteraan suatu masyarakat perlu dihitung pendapatan dengan harga tetap. Masyarakat dipandang mengalami pertambahan dalam kemakmuran atau kesejahteraan apabila pendapatan per kapita menurut harga tetap atau pendapatan per kapita riil terus menerus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Implikasi dari perkembangan ekonomi ini diharapkan nantinya mampu menambah kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat menjadi semakin tinggi.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert dan Hahnel, 2005). Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Perkembangan lainnya dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

2.1.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

Menurut Rachmat (2013), Salah satu unsur kesejahteraan petani adalah kemampuan daya beli dari pendapatan petani untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran rumah tangga petani. Peningkatan kesejahteraan dapat diukur dari peningkatan daya beli pendapatan untuk memenuhi pengeluarannya tersebut. Semakin tinggi daya beli pendapatan petani terhadap kebutuhan konsumsi maka semakin tinggi nilai tukar petani dan berarti secara relatif petani lebih sejahtera.

Dalam mengetahui kesejahteraan petani maka digunakan indikator Nilai tukar petani (NTP). Menurut Rusono, Dkk (2013) NTP merupakan ukuran

kemampuan daya beli/daya tukar petani terhadap barang yang dibeli petani. Peningkatan nilai tukar petani menunjukkan peningkatan kemampuan riil petani dan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani, atau sebaliknya.

Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan pengembangan dan penerapan skala makro dari konsep nilai tukar. Skala makro dari nilai tukar adalah NTP diukur dalam skala nasional yang merupakan agregasi dari NTP regional provinsi dan agregasi sub sektor (juga merupakan agregasi komoditi).

NTP dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Kenaikan HT dengan laju yang lebih besar akan menghasilkan kenaikan daya beli dan sebaliknya. HT sebagai indikator penerimaan petani mempunyai arah positif terhadap kesejahteraan petani (NTP) dan HB sebagai indikator pengeluaran petani mempunyai arah negatif terhadap kesejahteraan petani (NTP).

Harga yang diterima petani merupakan harga tertimbang dari harga setiap komoditas pertanian yang diproduksi/dijual petani. Penimbang yang digunakan adalah nilai produksi yang dijual petani dari setiap komoditas. Harga komoditas pertanian merupakan harga rata-rata yang diterima petani atau *Farm Gate*. Sedangkan Harga yang dibayar petani merupakan harga tertimbang dari harga/biaya konsumsi makanan, konsumsi non makanan dan biaya produksi dan penambahan barang modal dari barang yang dikonsumsi atau dibeli petani. Komoditas yang dihasilkan sendiri tidak masuk dalam perhitungan harga yang dibayar petani. Harga yang dimaksud adalah harga eceran barang dan jasa yang di pasar perdesaan.

Menurut BPS (2020), arti angka Nilai Tukar Petani (NTP) ada 3, yaitu:

1. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
2. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
3. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

2.1.2 Ekspor

Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri untuk dijual ke luar negeri (Mankiw, 2013). Sejalan dengan Menurut Nopirin (1997) ekspor berasal dari suatu produksi dalam negeri dijual dipakai oleh penduduk luar negeri, maka ekspor merupakan injeksi kedalam aliran pendapatan seperti halnya investasi.

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu (Adrian, 2014).

Menurut Sukirno (2006) Secara fisik ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai

akibat kegiatan mengekspor barang dan jasa, pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional.

Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat output yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan, 2000). Ekspor akan memperbesar kapasitas konsumsi suatu Negara meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber-sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potensial untuk berbagai produk ekspor yang mana tanpa produk-produk tersebut, maka Negara-negara miskin tidak akan mampu mengembangkan kegiatan dan kehidupan perekonomian nasionalnya. Ekspor juga dapat membantu semua Negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keunggulan komperatif, baik itu berupa ketersediaan faktor-faktor produksi tertentu dalam jumlah yang melimpah atau keunggulan efesiensi alias produktifitas tenaga kerja. Ekspor juga dapat membantu semua Negara dalam mengambil keuntungan dari skala ekonomi yang mereka miliki (Todaro & Smith, 2000).

2.1.3 Kebijakan Subsidi

Subsidi adalah pemberian pemerintah kepada produsen untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen. Subsidi dapat menurunkan harga. Sampai dimana besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya subsidi adalah bergantung kepada besarnya penurunan harga yang berlaku (Rofyanto dan Wibowo, 2017).

Sejalan dengan itu pengertian lain Subsidi yaitu merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor untuk meningkatkan produktivitas. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Spencer dan Amos (1993) menjelaskan secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (output).

Suparmoko (2003) mengartikan subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (*in kind subsidy*).

Menurut JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 2021) kementerian keuangan, Belanja subsidi adalah Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Belanja subsidi terdiri dari:

1. Subsidi Energi. Yaitu Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, *liquefied petroleum gas* (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
2. Subsidi Non Energi. Yaitu Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) dalam subsidi termasuk semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Yang dimaksud dengan subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi untuk barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, sehingga bantuan berupa barang modal dan dalam bentuk uang untuk pembentukan modal tidak termasuk. Tujuan pemberian subsidi, antara lain, adalah menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita perusahaan dan lain-lain. Data yang tercakup dalam perincian subsidi ini adalah subsidi bahan bakar dan subsidi pupuk (Mudhiatil, 2018).

2.1.4 Investasi

Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah (Webster, 1999). Menurut Lypsey (1997), investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang.

Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka Panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003). Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan moneter, yang diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan yang diperoleh di masa datang (jogiyanto, 2007).

Menurut Nurkse dalam Jhingan (2012) pembentukan modal terjadi saat masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk membeli barang-barang konsumsi, tetapi menggunakan sebagian untuk membuat barang-barang modal yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat produktif. Artinya masyarakat tidak menghabiskan seluruh pendapatannya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi semata melainkan juga menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membuat barang-barang modal, alat-alat, perlengkapan dan lain-lain yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional.

Faktor-faktor penting yang menentukan tingkat investasi adalah tingkat keuntungan yang akan diperoleh., suku bunga, remalan mengenai keadaan dimasa yang akan datang, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan (Sukirno, 2008).

Secara umum investasi di Indonesia dibedakan menjadi dua macam yaitu: penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN, menurut undang-undang No.6 tahun 1968 PMDN adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. PMA merupakan aliran arus modal yang berasal dari

luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi yang tidak langsung/portofolio (Suyatno, 2003).

2.1.5 Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Harga merupakan jumlah yang dijual oleh suatu produk per unitnya, dan memberikan gambaran berapa masyarakat bersedia membayar. Seberapa banyak suatu produk dapat dibuat dapat ditentukan seberapa besar harga input yang meliputi modal, tanah, dan tenaga kerja. Dalam perekonomian pasar, sistem harga dapat melakukan dua fungsi yang berkaitan (Case dkk, 2012).

Kebijakan penjataan harga suatu barang khususnya yang melebihi permintaan dapat dinilai baik oleh pemerintah dan swasta untuk memenuhi aspek keadilan. Penjataan harga artinya kapan pun adanya kebutuhan untuk pemeratakan suatu barang (lebihnya permintaan di pasar bebas) maka akan terjadi kenaikan harga sehingga jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan (pasar seimbang). (Aep, 2020)

Bahan bakar minyak (BBM) adalah barang strategis yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan amanat konstitusi, produksi, distribusi, dan harganya dikuasai oleh negara. Dalam rangka mendorong perekonomian nasional dan meringankan beban ekonomi rakyat. Selama ini harga BBM ditetapkan oleh pemerintah, harga BBM di pasar dalam negeri ditetapkan lebih rendah dari harga yang semestinya berdasarkan ongkos produksi atau mekanisme pasar bebas. Harga BBM yang dibayar perorangan atau perusahaan disubsidi oleh pemerintah yang ongkosnya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (pantjar dan friyatno, 2016).

Naiknya harga BBM di nasional diawali oleh naiknya harga minyak dunia. yang membuat pemerintah tidak dapat menjual BBM kepada masyarakat dengan harga yang sama dengan harga sebelumnya, karena hal itu dapat menyebabkan pengeluaran APBN untuk subsidi minyak menjadi lebih tinggi. Maka pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM, (Suryadi, 2015).

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dapat menyebabkan perubahan dalam perekonomian suatu negara, karena kenaikan harga suatu barang dapat menyebabkan perubahan permintaan dan penawaran terhadap barang tersebut ataupun barang lainnya, sebagaimana yang tertuang dalam teori permintaan dan penawaran suatu barang. Mankiw (2009) mengungkapkan bahwa jika semua hal dibiarkan sama maka ketika harga barang meningkat maka jumlah permintaannya akan menurun.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Hubungan ekspor dengan kesejahteraan nelayan

Semakin tinggi intensitas perdagangan bebas suatu negara akan mendorong peningkatan kompetisi di dalam negeri dan mendorong setiap industri untuk melakukan efisiensi dengan cara merelokasi sumber daya ke sektor-sektor yang sesuai dengan keunggulan komparatifnya, sehingga biaya inefisiensi yang menyebabkan rendahnya kesejahteraan dapat dihilangkan (Fahreza, 2018).

Menurut teori dari Stolper-Samuelson (1941) yang memprediksi bahwa liberalisasi perdagangan akan mengalihkan pendapatan dari faktor produksi yang langka (ditunjukkan dengan harga faktor produksi tersebut kepada faktor-faktor produksi yang melimpah (ditunjukkan dengan rendahnya harga factor produksi

tersebut) pada suatu negara. Artinya bahwa negara sedang berkembang dengan relatif melimpah tenaga kerjanya (diukur dengan rendahnya upah terhadap faktor produksi lainnya), diprediksikan bahwa liberalisasi perdagangan akan menaikkan tingkat upah di negara relatif terhadap harga faktor produksi lainnya, dan ini disebabkan karena produktivitas tenaga kerja semakin meningkat dengan meningkatnya derajat liberalisasi perdagangan, sehingga pada akhirnya distribusi pendapatan akan semakin membaik.

Dampak perdagangan internasional (Ekspor) terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Secara teori, liberalisasi perdagangan diharapkan dapat membentuk pola perdagangan yang efisien berdasarkan prinsip keunggulan komparatif. Adopsi dari prinsip keunggulan komparatif akan menjamin bahwa sebuah negara akan meraih kesejahteraan ekonomi yang lebih besar melalui partisipasi dalam perdagangan luar negeri daripada melalui proteksi perdagangan (Gilpin, 2001).

2.2.2 Hubungan Kebijakan subsidi dengan kesejahteraan nelayan

Subsidi pemerintah (subsidi energi dan non energi) yang lebih cenderung pada subsidi input, lebih besar dampaknya pada pembentukan harga komoditas pangan di tingkat petani/nelayan dibandingkan dengan dampaknya terhadap kesejahteraan petani/nelayan. Seperti juga diketahui dari badan pusat statistik (2021) bahwa besaran NTP sebagai indikator kesejahteraan petani lebih dipengaruhi oleh besaran harga yang diterima petani sebagai produsen daripada besaran harga yang dibayar petani.

Menurut Lin dan Jiang (2011) bahwa terdapat gap antara harga aktual konsumsi subsidi dengan harga konsumsi akhir tanpa subsidi. Subsidi berperan pada kesejahteraan sosial, insentif pengiriman dan konsumsi yang efisien, tetapi

harus dipertimbangkan dampak terhadap kelangkaan dan isu lingkungan. Subsidi menurut Lin dan Kuang (2020) berdampak pada aktivitas pemenuhan pangan, pakaian, perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan rekreasi.

secara umum kebijakan subsidi, input atau benih berpengaruh negatif terhadap Nilai tukar Petani dikarenakan relatif kecil dan bervariasinya realisasi penyaluran subsidi input atau benih antar tahun tidak dapat menjelaskan kelayakan/signifikansi pengaruhnya terhadap nilai tukar petani. Selain itu, juga ada indikasi terdapat masalah pada penyalurannya terkait ketepatan waktu, mutu, dan jumlah sehingga pengaruhnya ke Nilai Tukar Petani kurang terlihat (Prasetyo, 2019).

Menurut Mayrowani (2008) menyebutkan bahwa dampak subsidi input atau benih terhadap produktivitas dan pendapatan petani sangat bervariasi dan tergantung oleh penerimaan subsidi benih yang tepat waktu, mutu, dan jumlah. Penyaluran subsidi benih yang ideal adalah bagaimana benih sampai ke petani tepat saat dibutuhkan. Selain itu, menurut kajian Bappenas (2011) Harga benih bersubsidi hanya sedikit lebih rendah dibanding harga benih non- subsidi, sedangkan mutu/kapasitas benih bersubsidi tidak berbeda secara signifikan dari benih non-subsidi. Hal ini menyebabkan petani pada umumnya belum tertarik untuk membeli benih bersubsidi.

2.2.3 Hubungan investasi dengan kesejahteraan nelayan

Meningkatnya kegiatan investasi atau penanaman modal dalam negeri atau asing di suatu daerah akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya kegiatan investasi tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, sehingga masyarakat

memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Awandari & Indrajaya, 2016).

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan investasi, dimana investasi akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih bermanfaat kepada kaum miskin (Yusuf & Summer, 2015).

Investasi berdampak pada masyarakat dari segi aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial meliputi mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan dalam aspek ekonomi, Investasi dapat membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kemajuan teknis (Assadzadeh dan Pourqoly, 2013).

Menurut penelitian Wiharjo (2014) dan Suciarti, Dkk (2015) Pada kegiatan investasi terdapat hubungan yang erat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena akan memunculkan kegiatan produksi yang meningkat sehingga masyarakat yang terserap akan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.2.4 Hubungan Harga BBM terhadap kesejahteraan nelayan

Kebutuhan energi berupa bahan bakar berpengaruh terhadap kemampuan rumah tangga pada keterjangkauan harga beli barang dan jasa. Penurunan harga bahan bakar dan listrik dapat menimbulkan ketimpangan jika kelas pendapatan menengah ke atas ikut mengkonsumsi secara dominan. Pengaruh energi bahan bakar (BBM) terhadap kesejahteraan secara langsung yaitu terhadap aktivitas memasak dan rumah tangga, lampu, dan transportasi

pribadi, sedangkan dampak secara tidak langsung yaitu pada kenaikan faktor produksi dan harga konsumen (Coady dan Arze, 2010).

Pengaruh kenaikan BBM terhadap kesejahteraan nelayan yaitu para perikanan tangkap akan mempengaruhi struktur biaya produksi. Sementara itu, terhadap rumah tangga, kenaikan harga BBM cenderung akan menurunkan daya beli masyarakat (Asmara *et al.*, 2011). Kenaikan biaya produksi pada satu sisi dan penurunan daya beli pada sisi lain akibat kenaikan harga BBM, pada akhirnya akan mendorong industri untuk mengurangi volume produksi. Pada sektor perikanan, ketika terjadi kenaikan BBM nelayan akan mengurangi frekuensi melaut. akibat kenaikan harga BBM mereka kesulitan melaut, dikarenakan kesejahteraan nelayan yang menurun (Mira *et al.*, 2014)

2.3 Tinjauan Empiris

Ni Kadek Eka Jayanthi dan Sudarsana Arka (2018) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Investasi, Ekspor, Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, ekspor dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Hasil analisis penelitian memperoleh kesimpulan bahwa variabel investasi secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Variabel ekspor secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, sedangkan variabel inflasi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Variabel investasi dan ekspor secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan inflasi dan

pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Weriantoni, Srivani, Lukman, Fini, Silvia, dan Enjelia (2017). Meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Karet (Studi Kasus di Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh luas lahan, jumlah produksi, tingkat pendidikan dan kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani karet yang digambarkan oleh jumlah pendapatan petani. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa luas lahan dan jumlah produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani karet sedangkan tingkat pendidikan dan kebijakan pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan petani karet.

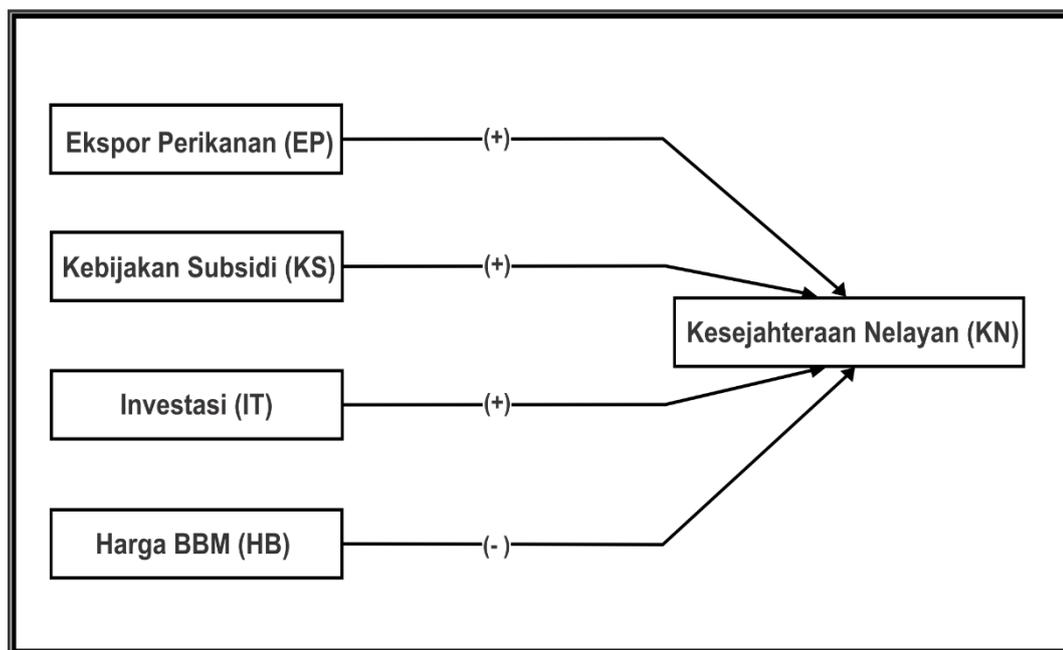
Elita Ratnasari (2020). Meneliti tentang “Dimensi Spasial Hubungan Antara Ekspor Pertanian dengan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola perkembangan ekspor sektor pertanian di Indonesia, mengidentifikasi variasi kesejahteraan petani antar provinsi di Indonesia, dan menganalisis hubungan nilai ekspor dengan indikator kesejahteraan petani di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pola spasial yaitu provinsi-provinsi di Pulau Jawa cenderung memiliki kinerja ekspor pertanian yang lebih baik daripada kondisi ekspor pertanian pada provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa dan kondisi tingkat kesejahteraan petani di Indonesia yang bervariasi antar daerahnya dengan indeks kesejahteraan petani yang cenderung lebih unggul pada sebagian besar provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Selain itu, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai ekspor pertanian dengan dua indikator kesejahteraan petani (NTP dan NTUP).

Pasaribu (2008), meneliti tentang “dampak kenaikan BBM (solar) terhadap usaha penangkapan ikan dengan pukat cincin” penelitian menggunakan metode analisis kualitatif dengan hasil yaitu pendapatan nelayan menurun sesudah kenaikan BBM, Nelayan kekurangan modal sesudah kenaikan BBM, nelayan melakukan upaya peminjaman modal kepada kerabat, rentenir, koperasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya.

Armen Zulham (2008) meneliti tentang “Dampak Subsidi Terhadap Surplus Produsen Dan Total Benefit Perikanan Tangkap Pantura Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan taraf hidup nelayan akibat dari subsidi adalah surplus produsen dan total benefit dari eksploitasi potensi ikan. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan subsidi perikanan akan mendorong peningkatan surplus produsen. Pengaruh subsidi perikanan yang meningkatkan surplus produsen dalam jumlah yang relatif tinggi terjadi pada daerah Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemasang, dan Kota Pekalongan. Sementara pengaruh subsidi perikanan terhadap peningkatan surplus produsen di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Kendal dapat dikatakan relatif kecil. Peningkatan surplus produsen belum tentu meningkatkan total benefit, hal ini terjadi jika surplus produsen baseline lebih besar dari surplus produsen subsidi.

2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu analisis kesejahteraan nelayan yang dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah: (1) ekspor (2) kebijakan subsidi, (3) investasi, dan (4) harga BBM. Berdasarkan hubungan antar variabel Pada sub bab 2.2 maka gambar 2.1 menunjukkan kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1: Kerangka Konseptual Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian.

Untuk melakukan analisa terhadap kesejahteraan nelayan di Indonesia diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan nelayan di Indonesia.

2. Diduga kebijakan subsidi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan nelayan di Indonesia.
3. Diduga investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan nelayan di Indonesia.
4. Diduga harga BBM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan nelayan di Indonesia.